

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sudah berjalan namun berpotensi belum optimal. Implementor sudah melaksanakan program sistem zonasi PPDB SMA Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan dari pusat dan daerah yang tertera juga pada juknis pelaksanaan PPDB SMA di Kota Semarang tahun 2021. Tetapi seluruh daya tampung yang tersedia pada masing-masing satuan sekolah SMA di Kota Semarang belum terpenuhi sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan pada juknis PPDB SMA di Kota Semarang. Kemudian dianalisis dan ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang memiliki indikator-indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Sesuai dengan enam indikator-indikator yang mempengaruhi kesuksesan kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam program PPDB SMA di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sudah berjalan baik dalam dimensi indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakter, serta sikap dan kecenderungan (disposisi). Permasalahan saat implementasi program PPDB SMA di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 terdapat pada indikator sasaran dan tujuan dan juga permasalahan pada indikator komunikasi antar organisasi.

2. Permasalahan yang ditemui saat implementasi kebijakan PPDB SMA di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 tetap ditemui dalam variabel sasaran dan tujuan serta pada variabel komunikasi antar organisasi hal tersebut sesuai dengan indikator teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn karena saat pelaksanaan program PPDB SMA di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 ada juga potensi kecurangan peserta dalam mengakali persyaratan keterangan domisili pada Kartu Keluarga dan juga ketidak sesuaian daya tampung sebagai ukuran kesuksesan kebijakan sistem zonasi. miskomunikasi antara panitia penyelenggara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan panitia penyelenggara di tingkat SMA. Selain itu, ada juga terkait persyaratan keterangan domisili pada kartu keluarga yang berubah tiba-tiba saat pelaksanaan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang yang mejadi penyebab permasalahan miskomunikasi antara panitia dari provinsi dengan panitia dibawah strukturalnya yang berdampak membuat panitia tingkat SMA di Kota Semarang.
3. Solusi dan tindakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan evaluasi dari kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2021/2022. Tindakan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah setelah mengevaluasi adalah bersama-sama mengkoordinasikan permasalahan

supaya tidak terjadi kembali saat kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang diselenggarakan pada tahun selanjutnya.

4.2 Saran

Dalam implementasi suatu kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn ada 6 variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi diantaranya: Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan para pelaksanaan (disposisi), komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang tahun 2021 terdapat permasalahan pada variabel komunikasi antar organisasi dan sumber daya. Peneliti berharap ditahun berikutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bisa mengantisipasi terkait permasalahan kecurangan peserta yang mengakali persyaratan keterangan domisili pada KK dan miskomunikasi antara panitia pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan panitia pelaksana dari SMA. Pada tahun berikutnya diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bisa memberikan pelatihan dan sosialisasi dengan lebih serius dan lebih memperhatikan pemahaman panitia pelaksana SMA supaya lebih optimal dan dalam pelaksanaan sosialisasi terkait juknis tidak terjadi permasalahan miskomunikasi antara panitia pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan panitia pelaksana dari SMA lagi. Perlu meningkatkan sistem dalam memberikan keadilan yang belum terciptakan dengan

adanya oknum peserta yang mencurangi surat keterangan domisili membuat kebijakan ini dijalankan percumah.